

***Civic skills* sebagai Pilar Partisipasi Warga Negara Demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan**

Tiara Syifa Saadah

Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung Jl.
Kanayakan No.21, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Email: 222442047@mhs.polman-bandung.ac.id

Abstrak

Civic skills merupakan salah satu dimensi penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang berperan dalam membentuk kemampuan warga negara untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya bertujuan mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga diarahkan pada penguatan keterampilan kewarganegaraan yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Civic skills* sebagai pilar partisipasi warga negara demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap jurnal ilmiah nasional terbitan tahun 2021–2025 yang relevan dengan topik *Civic skills* dan pendidikan kewarganegaraan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pemaknaan *Civic skills*, dimensi keterampilan kewarganegaraan yang menyusunnya, peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan *Civic skills*, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Civic skills* mencakup keterampilan intelektual seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah publik, serta keterampilan partisipatoris seperti komunikasi, kerja sama, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan secara partisipatif, reflektif, dan kontekstual terbukti memiliki peran strategis dalam mengembangkan *Civic skills* mahasiswa. Oleh karena itu, penguatan *Civic skills* perlu dijadikan fokus utama dalam pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis.

Kata Kunci: *Civic skills*, Pendidikan Kewarganegaraan, Partisipasi Warga Negara, Demokrasi, Pancasila

Abstract

Civic skills are a crucial dimension of civic education that play an essential role in developing citizens' abilities to think critically, participate actively, and make responsible decisions in democratic life. Civic education in Indonesia is not only aimed at developing civic knowledge but also at strengthening *Civic skills* that enable learners to engage actively in social, political, and community life. This study aims to analyze the role of *Civic skills* as a pillar of democratic citizen participation through civic education in Indonesia. The research employs a qualitative approach using a literature study method by reviewing national scientific journals published between 2021 and 2025 related to *Civic skills* and civic education. Data were analyzed using content analysis techniques to identify the conceptualization of *Civic skills*, their main dimensions, the role of civic education in developing *Civic skills*, and their relevance in addressing contemporary democratic challenges in Indonesia. The findings indicate that *Civic skills* consist of intellectual skills such as critical thinking and public problem-solving, as well as participatory skills including communication, collaboration, and involvement in public decision-making. Civic education implemented through participatory, reflective, and contextual learning approaches has a strategic role in strengthening students' *Civic skills*. Therefore, strengthening *Civic skills* should be prioritized in the curriculum and instructional practices of civic education to enhance the quality of democratic participation..

Keywords: *Civic skills*, Civic Education, Citizen Participation, Democracy, Pancasila



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Winarno, 2023). Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan tentang negara, konstitusi, dan sistem politik, tetapi juga pada pengembangan kemampuan praktis warga negara dalam menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin kompleks (Budimansyah, 2021). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk mampu membekali peserta didik dengan seperangkat kompetensi kewarganegaraan yang utuh dan berkelanjutan. Secara konseptual, kompetensi kewarganegaraan mencakup tiga dimensi utama, yaitu *civic knowledge*, *Civic skills*, dan *civic disposition*. *Civic knowledge* berkaitan dengan pemahaman konsep, prinsip, dan sistem kewarganegaraan; *civic disposition* menekankan pada sikap dan karakter kewarganegaraan; sedangkan *Civic skills* berfokus pada keterampilan warga negara dalam menerapkan pengetahuan dan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata (Suyato & Widodo, 2020). Dari ketiga dimensi tersebut, *Civic skills* memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara pengetahuan kewarganegaraan dan praktik partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis.

Civic skills dipahami sebagai kemampuan warga negara untuk berpikir kritis, menganalisis masalah publik, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum (Prasetyo & Nugroho, 2022). Keterampilan ini memungkinkan warga negara tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks demokrasi modern, *Civic skills* menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya partisipasi warga negara yang bermakna dan bertanggung jawab (Sari & Hidayat, 2022). Realitas sosial-politik di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan *Civic skills* masih menghadapi berbagai tantangan (Herlambang, 2024). Fenomena rendahnya partisipasi politik generasi muda, meningkatnya apatisme sosial, lemahnya kemampuan berpikir kritis terhadap isu publik, serta maraknya disinformasi di ruang digital menunjukkan bahwa keterampilan kewarganegaraan warga negara belum berkembang secara optimal (Rahmawati et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan belum sepenuhnya berhasil membekali peserta didik dengan *Civic skills* yang memadai untuk menghadapi dinamika demokrasi kontemporer.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan *Civic skills*. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang partisipasi warga negara yang lebih luas; namun di sisi lain, tanpa *Civic skills* yang kuat, partisipasi tersebut berpotensi bersifat dangkal, emosional, dan tidak bertanggung jawab (Setiawan & Lestari, 2025). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu merespons perkembangan tersebut dengan mengintegrasikan penguatan *Civic skills* yang relevan dengan konteks kehidupan demokrasi di era digital. Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab strategis dalam mengembangkan *Civic skills* mahasiswa sebagai calon warga negara dewasa dan agen perubahan sosial (Winarno, 2023). Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan profesional, tetapi juga keterampilan kewarganegaraan yang memungkinkan mereka berkontribusi secara aktif dan etis dalam kehidupan publik (Budimansyah, 2021). Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu dirancang secara partisipatif, reflektif, dan kontekstual agar mampu mengembangkan *Civic skills* mahasiswa secara optimal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada penguatan *Civic skills* berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas partisipasi warga negara (Prasetyo & Nugroho, 2022). Mahasiswa yang memiliki *Civic skills* yang baik cenderung lebih kritis dalam menyikapi isu kebangsaan, lebih terbuka terhadap perbedaan, serta lebih aktif dalam kegiatan sosial dan demokratis (Rahmawati et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *Civic skills* merupakan indikator penting keberhasilan pendidikan kewarganegaraan. Namun demikian, implementasi penguatan *Civic skills* dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pendekatan pembelajaran yang terlalu teoritis, minimnya pembelajaran berbasis pengalaman, serta terbatasnya ruang partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran (Herlambang, 2024). Kondisi ini menyebabkan *Civic skills* sering kali tidak terinternalisasi secara mendalam dalam diri mahasiswa (Setiawan & Lestari, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai *Civic skills* dalam konteks pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam. Penelitian ini difokuskan pada analisis peran *Civic skills* sebagai pilar partisipasi warga negara demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Melalui kajian literatur terhadap jurnal ilmiah nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada penguatan keterampilan kewarganegaraan.

Landasan Teoritis

1. *Civic skills* dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Civic skills* merupakan salah satu komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan selain civic knowledge dan civic disposition (Budimansyah, 2021). *Civic skills* menekankan pada kemampuan praktis warga negara dalam menjalankan perannya secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Suyato & Widodo, 2020). Secara konseptual, *Civic skills* terdiri atas keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris. Keterampilan intelektual mencakup kemampuan berpikir kritis, menganalisis isu publik, serta memecahkan masalah sosial (Prasetyo & Nugroho, 2022). Sementara itu, keterampilan partisipatoris meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berdiskusi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik (Sari & Hidayat, 2022).
2. *Civic skills* dalam Kerangka Pendidikan Demokratis. Dalam kerangka pendidikan demokratis, *Civic skills* berfungsi sebagai modal utama warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan publik (Herlambang, 2024). *Civic skills* memungkinkan warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam proses demokrasi (Rahmawati et al., 2024). Pengembangan *Civic skills* melalui pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk warga negara yang kritis, komunikatif, dan mampu bekerja sama dalam masyarakat pluralistik (Setiawan & Lestari, 2025). Dengan demikian, *Civic skills* menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang substansial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji secara mendalam konsep *Civic skills* dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, konsep, serta peran *Civic skills* sebagai fenomena pendidikan dan sosial, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan berbagai pandangan teoretis dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan *Civic skills* dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan kualitatif

memungkinkan peneliti melakukan analisis interpretatif terhadap gagasan, argumentasi, dan hasil penelitian yang berkembang dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, *Civic skills* dipahami tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kompetensi kewarganegaraan yang relevan dengan dinamika demokrasi kontemporer di Indonesia.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025. Jurnal-jurnal tersebut membahas topik *Civic skills*, pendidikan kewarganegaraan, partisipasi warga negara, pendidikan demokrasi, dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan. Penelusuran sumber data dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan Neliti untuk menjamin kredibilitas serta relevansi sumber dengan konteks pendidikan di Indonesia. Pemilihan jurnal nasional dilakukan agar analisis yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sistem pendidikan nasional, serta kondisi sosial-politik Indonesia. Artikel yang dipilih merupakan jurnal yang secara eksplisit membahas *Civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep, tema, dan pola pemikiran yang berkaitan dengan *Civic skills* dalam pendidikan kewarganegaraan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca secara cermat setiap sumber literatur, mengodekan konsep utama seperti keterampilan berpikir kritis, partisipasi warga negara, komunikasi publik, dan kerja sama sosial, serta mengelompokkan konsep-konsep tersebut berdasarkan kesamaan makna. Hasil pengelompokan selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan temuan antarjurnal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran *Civic skills* dalam membentuk partisipasi warga negara demokratis. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan konseptual mengenai posisi *Civic skills* dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian sepenuhnya menggunakan data sekunder sehingga tidak menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Kedua, fokus penelitian yang hanya menggunakan jurnal nasional menyebabkan kajian ini belum membandingkan perkembangan konsep *Civic skills* dalam perspektif internasional. Selain itu, analisis literatur sangat bergantung pada interpretasi peneliti sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penafsiran data. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi luas, melainkan sebagai dasar teoretis bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris di bidang pendidikan kewarganegaraan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa *Civic skills* diposisikan sebagai elemen kunci dalam pendidikan kewarganegaraan karena berhubungan langsung dengan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. *Civic skills* tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis, tetapi sebagai kompetensi kewarganegaraan yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi publik, kerja

sama sosial, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai jurnal yang dianalisis menegaskan bahwa *Civic skills* mencakup dua dimensi utama, yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris. Keterampilan intelektual meliputi kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah publik, mengevaluasi informasi, serta mengambil keputusan secara rasional. Sementara itu, keterampilan partisipatoris mencakup kemampuan berkomunikasi, berdiskusi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun politik.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, *Civic skills* berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan kewarganegaraan dan praktik kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Pendidikan kewarganegaraan yang hanya menekankan aspek kognitif dinilai kurang efektif dalam membentuk warga negara yang aktif. Sebaliknya, pembelajaran yang bersifat partisipatif dan kontekstual terbukti lebih mampu mengembangkan *Civic skills* mahasiswa. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengembangkan *Civic skills* mahasiswa sebagai calon warga negara dewasa. Melalui diskusi kritis, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah, mahasiswa dapat menginternalisasi keterampilan kewarganegaraan secara lebih mendalam. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa pendekatan pembelajaran yang terlalu teoritis dan minim pengalaman nyata, sehingga pengembangan *Civic skills* belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Civic skills* merupakan komponen fundamental dalam pendidikan kewarganegaraan yang berperan penting dalam membentuk partisipasi warga negara demokratis di Indonesia. *Civic skills* mencakup keterampilan berpikir kritis, komunikasi publik, kerja sama sosial, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengembangkan *Civic skills* mahasiswa melalui pembelajaran yang partisipatif, reflektif, dan kontekstual. Pendekatan pembelajaran yang hanya berfokus pada aspek kognitif terbukti kurang efektif dalam membentuk keterampilan kewarganegaraan secara utuh. Oleh karena itu, penguatan *Civic skills* perlu dijadikan fokus utama dalam pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Integrasi *Civic skills* secara konsisten diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas partisipasi warga negara serta memperkuat kehidupan demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi *Civic skills* sebagai kapasitas kewarganegaraan yang mengintegrasikan keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris dalam satu kerangka kompetensi untuk memperkuat kualitas partisipasi demokratis. Kajian terdahulu umumnya menempatkan *Civic skills* secara terpisah sebagai kemampuan berpikir kritis, komunikasi, pemecahan masalah, atau partisipasi sosial, sementara keterkaitan sistematis antara dimensi tersebut dengan praktik pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual masih relatif terbatas. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa *Civic skills* tidak hanya merupakan learning outcomes pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara pengetahuan kewarganegaraan dan tindakan kewarganegaraan yang demokratis, melalui kemampuan peserta didik untuk menganalisis persoalan publik, membangun argumentasi berbasis bukti, berkomunikasi secara deliberatif, berkolaborasi lintas perbedaan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan publik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman konseptual *Civic skills* dari keterampilan individual menuju kapasitas partisipasi demokratis yang bersifat deliberatif, kolaboratif, dan kontekstual, sekaligus

menegaskan perlunya transformasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dari orientasi penguasaan pengetahuan menuju pengalaman partisipasi nyata yang mempersiapkan warga negara menghadapi kompleksitas demokrasi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2021). Penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter Pancasila di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 85–97. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i2.11532>
- Herlambang, Y. T. (2024). Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan karakter demokratis mahasiswa di era disrupsi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 45–56. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.64321>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 123 –134. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.1987>
- Prasetyo, A., & Nugroho, R. A. (2022). Civic disposition sebagai fondasi penguatan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 101–113. <https://doi.org/10.24269/jpk.v7i2.5123>
- Rahmawati, D., Sari, M. P., & Lestari, N. (2024). Internalisasi civic disposition melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 22–34. <https://doi.org/10.17977/um019v9i12024p022>
- Sari, N., & Hidayat, A. (2022). Tantangan penguatan civic disposition mahasiswa dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 15–27. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6312>
- Setiawan, B., & Lestari, E. (2025). Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan civic disposition generasi muda. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.30595/jpsh.v4i1.18234>
- Suyato, & Widodo, S. T. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan civic disposition mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 134–146. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.34192>
- Winarno. (2023). Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan warga negara demokratis di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.24269/jpk.v8i1.5894>
- Zed, M. (2021). Metode penelitian kepustakaan dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(2), 112–120. <https://doi.org/10.17977/um048v27i22021p112>